



Literasi Wabah Covid-19

by Dr. Mochammad Kresna Noer

Apakah terdapat masalah literasi terkait wabah covid-19?



literacy [lit-er-uh-see] SHOW IPA 🔊

SEE SYNONYMS FOR literacy ON THESAURUS.COM

noun

- 1 the quality or state of being **literate**, especially the ability to read and write.
- 2 possession of education;
to question someone's literacy
- 3 a person's knowledge of a particular subject or field;
to acquire computer literacy;
improving your financial literacy

faith [fayth] SHOW IPA 🔊

SEE SYNONYMS FOR faith ON THESAURUS.COM

noun

- 1 confidence or trust in a person or thing:
faith in another's ability
- 2 belief that is not based on proof:
He had faith that the hypothesis would be substantiated by fact
- 3 belief in God or in the doctrines or teachings of religion:
the firm faith of the Pilgrims
- 4 belief in anything, as a code of ethics, standards of merit, etc.:
to be of the same faith with someone concerning honesty

perception [per-sep-shu/hn] SHOW IPA 🔊

SEE SYNONYMS FOR perception ON THESAURUS.COM

noun

- 1 the act or faculty of **perceiving**, or apprehending by means of the senses or of the mind; cognition; understanding.
- 2 immediate or intuitive recognition or appreciation, as of moral, psychological, or aesthetic qualities; insight; intuition; discernment;
an artist of rare perception



Subscribe

Latest Issues

SCIENTIFIC
AMERICAN 175

Cart 0

Sign In | Stay Informed

CORONAVIRUS THE SCIENCES MIND HEALTH TECH SUSTAINABILITY VIDEO PODCASTS BLOGS PUBLICATIONS Q

NEUROSCIENCE

Our Brain Uses a Not-So-Instant Replay to Make Decisions

Neural processing centers repeat recent sequences of events to lay down new memories used for abstract thought

By Bret Stetka on June 27, 2019 [اقرأ هذا باللغة العربية](#)



The Process

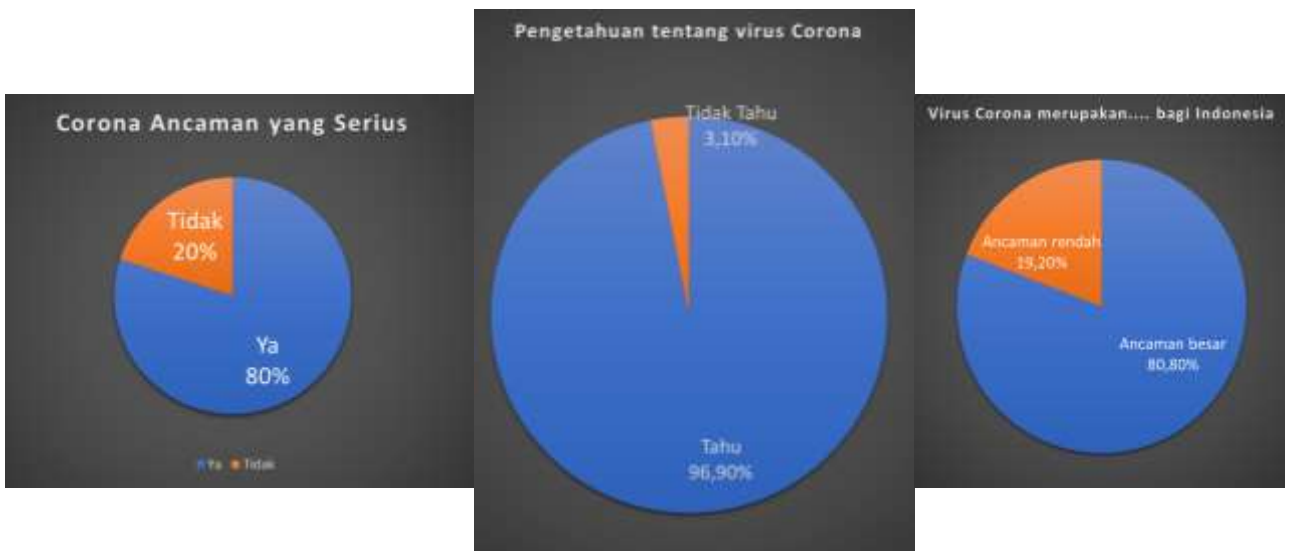


Survei oleh Kedaikopi

- Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia
- Pengambilan Data: 3-4 Maret 2020 di 34 Provinsi
- Responden Sejumlah:483
- Dengan Usia: 22-36 tahun, margin of error 4.46%
- Metode survei: wawancara via telepon
- Skala Thurstone 1-10
- Tingkat Kepercayaan 95%

Sumber:

<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/05/17292941/survei-kedaikopi-mayoritas-responden-percaya-pemerintah-mampu-tangani-virus>

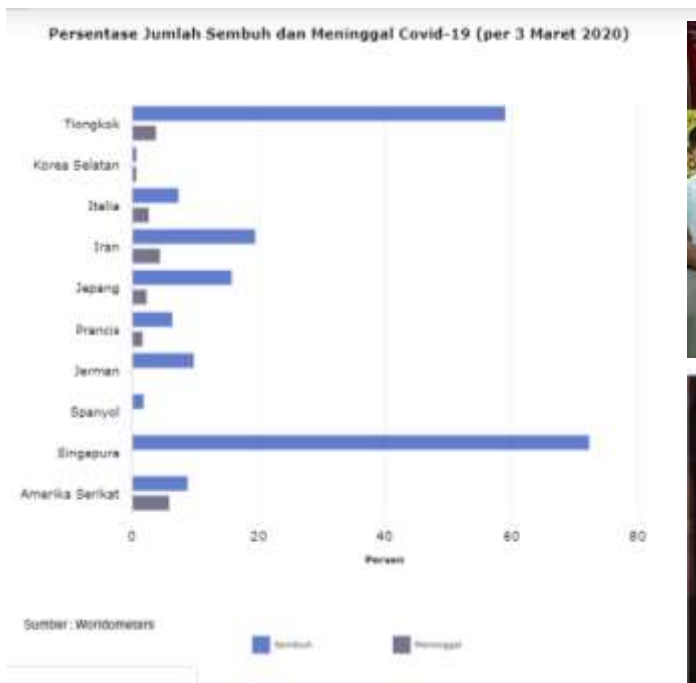




Paparan Informasi Covid-19



Persepsi



cnbcindonesia.com/tech/20200328191027-37-148206/anies-perpanjang-tanggap-darurat-corona-dki-sampai-19-april

Journal of Commun... Certification in Com...

MARKET INVESTMENT NEWS ENTREPRENEUR SYARIAH TECH LIFESTYLE INSIGHT LAINNYA CNBC TV LOGIN

Anies Perpanjang Tanggap Darurat Corona DKI Sampai 19 April

Polida, dan Kodam yang terkait sipil itu akan juga terus bekerja dari rumah. Tempat wisata juga penutupannya diperpanjang, kegiatan belajar-mengajar juga diperpanjang, semuanya mengikuti status tanggap darurat yang diperpanjang sampai 19 April.

Kita mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tinggal di rumah, jangan bepergian kecuali untuk kegiatan yang esensial terkait dengan kebutuhan pokok, kesehatan. Tapi di luar itu, kami minta tetap tinggal di rumah.

Kami minta kepada seluruh masyarakat Jakarta tidak meninggalkan Jakarta, ke luar, khususnya ke kampung halaman. Pesan ini sesungguhnya sudah disampaikan berkali-kali. Tujuannya untuk memastikan Bapak-Ibu sekalian sehat dan bila membutuhkan pelayanan kesehatan, kami bisa memberikan bantuan.

Baca:

TERPOPULER

- Anies Perpanjang Tanggap Darurat Corona DKI Sampai 19 April
- Situs Streaming Film Buat Nonton Gratisan Saat di Rumah Saja
- 7 Mobile Game yang Buat Kamu Betah #Dirumahaja
- Terus Mengaspal, Grab Bike Ini Bukan Nekat Tapi Butuh Uang

Additional Perspective

Perspektif Hukum

- Alenia keempat UUD 1945 menyatakan bahwa "Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada..."
- Spirit ini bersemayam pula dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan.
- Dalam Pasal 156 UU Kesehatan diatur bahwa dalam melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular, pemerintah dapat menyatakan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau KLB.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/27/19512871/pan-demi-corona-dan-lockdown-dalam-diskursus-hukum?page=1>.

- Pasal 1 angka 1 UU Kejarantinaan Kesehatan, kejarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal ke luar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. **Kekarantinaan kesehatan ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat di pintu masuk dan di wilayah secara terpadu.**
- Tetapi sebelum itu...

<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/27/19512871/pan-demi-corona-dan-lockdown-dalam-diskursus-hukum?page=1>.

- Dalam Pasal 155 ayat (5) UU Kesehatan dinyatakan, **pemerintah daerah** dalam menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu singkat dan pelaksanaan surveilans serta menetapkan jenis penyakit yang memerlukan karantina, tempat karantina, dan lama karantina.
- Dengan Prosedur:
 1. Karantina, isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi;
 2. Pembatasan sosial berskala besar;
 3. Disinfeksi, dekontaminasi, disinfeksi, dan/atau deratisasi terhadap alat angkut dan barang; dan/atau penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/27/19512871/pan-demi-corona-dan-lockdown-dalam-diskursus-hukum?page=1>.

Baru...

- Penentuan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau KLB harus dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang diakui keakuratannya. Pandemi global virus corona masuk ke dalam kategori kejadian kesehatan luar biasa. Sejumlah pemerintah daerah telah menetapkan wilayahnya dengan status KLB, antara lain Kota Bogor dan Solo.
- Kedua, status KLB dalam UU Kesehatan terkoneksi dengan penetapan status KKM sebagaimana yang diatur dalam UU Keekarantinaan Kesehatan.
- Tahapan penetapan KKM dimulai dengan penetapan jenis penyakit dan faktor risiko yang dapat menimbulkan KKM oleh pemerintah pusat. Dengan status KKM ini, pemerintah pusat dapat menetapkan dan mencabut penetapan pintu masuk dan/atau wilayah di dalam negeri yang terjangkau.
- Selanjutnya, pemerintah pusat menetapkan jenis penyakit dan faktor risiko yang dapat menimbulkan KKM. Dalam kondisi KKM, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan harus dilakukan secara hati-hati.
- Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan pada KKM harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat secara cepat dan tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya. Apabila lambat dan tidak tetap, bencana nonalam ini akan semakin dasyat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/27/19512871/pan-demi-corona-dan-lockdown-dalam-diskursus-hukum?page=1>.